

Analisis Sektor Unggulan Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Timur

Eka Khairul An-Nisa

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
ekakhairulnisa@gmail.com

Sahri

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
sahri.feb@unram.ac.id

Baiq Saripta Wijimulawiani

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
baiqsariptaw@unram.ac.id

Article's History:

Received 4 Februari 2024; Received in revised form 27 Februari 2024; Accepted 1 Maret 2024; Published 1 Juni 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

An-Nisa, E. K., Sahri., & Wijimulawiani, B. S. (2024). Analisis Sektor Unggulan Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Timur. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10 (3). 1653-1660. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2424>

Abstract

This study aims to analyze the leading sectors in East Lombok Regency and compare them with existing priority sectors. The analysis was carried out by comparing the Gross Domestic Product at Constant Prices of East Lombok Regency 2010-2018 and the Gross Regional Domestic Product at Constant Prices of West Nusa Tenggara Province 2010-2018. This research is quantitative research using the Location Quotient (LQ) analysis model and Descriptive Statistics. Based on the LQ analysis, there are 9 sectors that are the basic sectors in East Lombok Regency, namely the agriculture, forestry and fisheries sector; manufacturing industry sector; electricity and gas procurement sector; construction sector; wholesale and retail trade sector, car and motorcycle repair; real estate sector; government administration, defense and mandatory social security sector; education services sector; and health services and social activities sector. Some of the basic sectors that have become priority sectors in East Lombok Regency are education, health, and public works and public housing.

Keywords: Basic Sector; Location Quotient (LQ); Priority Sector

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Lombok Timur serta mengkomparasikannya dengan sektor prioritas yang sudah ada. Analisis yang dilakukan dengan membandingkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lombok Timur 2010-2018 dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2010-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan model analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Statistik Deskriptif*. Berdasarkan analisis LQ terdapat 9 sektor yang menjadi sektor basis di Kabupaten Lombok Timur yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor real estate; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Beberapa sektor basis yang sudah menjadi sektor prioritas di Kabupaten Lombok Timur yaitu pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Kata Kunci: Sektor Basis; *Location Quotient* (LQ); Sektor Prioritas

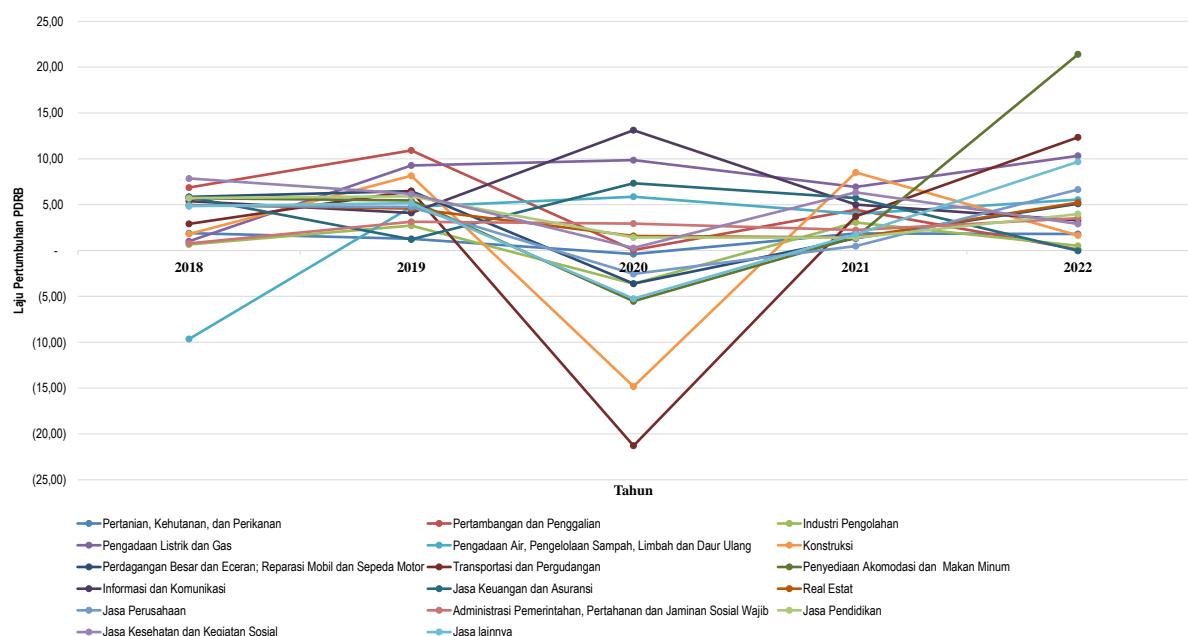
Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan strategi perencanaan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan semua potensi. Hal ini mutlak dilakukan untuk menyongsong otonomi daerah, dimana daerah dituntut secara aktif untuk melaksanakan pembangunan dengan kemampuan sendiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, penting untuk setiap daerah dapat menyesuaikan pembangunan sektoral di daerah dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah melalui kebijakan yang diterapkan.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pergeseran atau perubahan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Lombok Timur selama periode 2018-2022 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (2018- 2022) struktur perekonomian Kabupaten Lombok Timur didominasi oleh 6 lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Industri Pengolahan; dan Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan paparan diatas terlihat bahwa dalam pembentukan struktur perekonomian, terdapat sektor-sektor yang memiliki kontribusi yang besar yang dijadikan sektor unggulan sebagai alat penggerak sektor-sektor perekonomian secara keseluruhan dan mendorong pertumbuhan sektor lain dengan keterkaitan antar sektor (backward and forward linkage). Hasil penelitian Satrianto dan Sasongko (2013) mengungkapkan bahwa disparitas potensi antar wilayah menghasilkan efek limpahan positif. Daerah dengan potensi lebih tinggi akan memicu pertumbuhan ekonomi di daerah lain melalui sektor-sektor ekonomi, dan pada akhirnya mendorong perkembangan sektor lain yang sebelumnya belum terlihat. Mengingat strategisnya posisi Kabupaten Lombok Timur baik dilihat dari letak geografis maupun peranannya sebagai titik pertumbuhan, maka sektor unggulan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah daerah di sekitarnya.

Grafik 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2022



Mengacu pada data laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur menurut lapangan usaha dapat diketahui terdapat tiga kelompok kategori yang memberikan laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2022 yaitu, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 21,4 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,35 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,33 persen (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2022). Namun, belum dapat dipastikan apakah sektor tersebut merupakan sektor basis atau unggulan dari Kabupaten

Lombok Timur, karena diperlukan perbandingan dengan wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pembanding nilai sektor PDRB Kabupaten Lombok Timur.

Analisis mengenai sektor unggulan ini juga perlu dilakukan dalam rangka disiplin anggaran (Yuliastati, 2017). Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks perencanaan anggaran daerah (APBD), penting untuk mengidentifikasi sektor ekonomi yang menjadi prioritas di daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur.

Tinjauan Pustaka

Pembangunan dan Pertumbuhan Daerah

Pembangunan ekonomi merupakan peningkatan produksi dan pendapatan, dimana produk yang dimaksud adalah produk suatu daerah yang bernilai ekonomi yang nantinya bisa dijual menjadi pendapatan daerah (Lely et al., 2013). Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan dan merupakan suatu kegiatan berkelanjutan serta diharapkan menuju ke tingkat yang lebih baik atau berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, sektor maupun subsektor dijalankan secara terencana dan terprogram dalam pembangunan harus dilakukan secara bertahap (Rompas et al., 2015). Dengan memperhatikan sektor potensial yang ada di daerah tersebut, maka akan meningkatkan pendapatan daerah (Ristanti & Handoyo, 2017). Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai upaya kolaboratif pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat (Lantemona et al., 2014).

Adapun pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan gross domestic product (GDP) atau gross national product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah melalui pertumbuhan ekonomi tersebut perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Suatu pertumbuhan ekonomi tumbuh jika dalam jangka waktu yang cukup lama terjadi kenaikan output per kapita (Kurniawan, 2016).

Ekonomi Basis

Teori ekonomi basis pertama kali diperkenalkan oleh Walter Isard pada tahun 1956 dalam bukunya yang berjudul *Location and Space-Economy*. Sektor basis adalah sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk di luar wilayah tersebut. Dalam hal ini, sektor basis menjadi penunjang perekonomian di daerah (Tarigan, 2005, dikutip dalam Atama, 2016). Sektor non basis adalah sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk di dalam wilayah tersebut.

Menurut teori basis ekonomi, pertumbuhan suatu wilayah tergantung kepada adanya permintaan dari luar terhadap produksi wilayah tersebut. Hal ini menjadikan perekonomian dibagi menjadi sektor basis atau basis ekspor dan sektor non-basis. Sektor basis yang mengekspor produksinya keluar wilayah disebut sebagai basis ekonomi. Apabila permintaan dari luar wilayah terhadap sektor basis meningkat, maka sektor basis tersebut berkembang. Selanjutnya, permintaan suatu barang dan jasa akan semakin bertambah dan diharapkan dapat berpengaruh pada meningkatnya tingkat kegiatan non-basis sehingga akhirnya mengakibatkan berkembangnya wilayah yang bersangkutan (Richardson, 1991, dikutip dalam Putra, 2019).

Faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah menurut teori ekonomi basis ini adalah faktor yang bersangkutan langsung dengan permintaan barang dan jasa suatu daerah. Menggunakan sumber daya produksi lokal dalam proses produksi di sektor industri suatu daerah termasuk tenaga kerja dan bahan baku, dan outputnya, kemudian melakukan kegiatan ekspor yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita di suatu daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah selama periode tertentu (Wahyuningtyas et al., 2013). PDRB dapat digunakan untuk melihat kemajuan ekonomi di suatu kabupaten atau provinsi, misalnya kita dapat melihat dari data PDRB Kabupaten A atau PDRB Provinsi B (Hudiyanto, 2015). PDRB dapat menunjukkan gambaran perekonomian secara menyeluruh dan memberikan dampak langsung untuk perolehan pendapatan daerah.

Di samping itu, dengan melakukan analisis pertumbuhan PDRB juga dapat mengukur kontribusi masing-masing sektor terhadap total rencana pembangunan daerah secara keseluruhan dan sektor yang sama di daerah lain, serta besarnya harapan pada sektor-sektor yang akan menjadi sektor unggulan di masa mendatang (Supriadi et al., 2022).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, sehingga baik tujuan maupun sasaran akan dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasil guna. Sementara itu Mardiasmo (1990) mengatakan, bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah.

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, nantinya dapat disimpulkan sektor prioritas yang ada di daerah terkait. Sektor prioritas dalam APBD adalah sektor-sektor yang menjadi fokus pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Terdapat kriteria khusus agar suatu sektor dapat digolongkan ke dalam sektor prioritas. Sebagai gambaran, sektor tersebut harus merupakan proyek strategis nasional, padat modal, serta berorientasi pada kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan bahwa esensi dari perencanaan pembangunan adalah kegiatan dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbagai metode dan alur kegiatan yang sistematis dengan melihat kualitas sumber daya yang dimiliki (Siswidiyanto & Setyowati, 2012). Menurut Soekartawi (1990), pentingnya aspek perencanaan yang dikaitkan dengan aspek pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi dua topik utama yaitu:

- a) Perencanaan sebagai alat pembangunan; dan
- b) Perencanaan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya pembangunan tersebut.

Pengembangan Sektor Unggulan sebagai Strategi Pembangunan Daerah

Dengan adanya tujuan dan sasaran pembangunan daerah akan menciptakan strategi pembangunan yang lebih terarah dan terencana serta dapat memberikan acuan kepada pemerintah daerah. Sektor yang memiliki kemampuan produksi lebih tinggi bila dibandingkan dengan kemampuan sektor yang sama yang ada di daerah lain merupakan sektor ekonomi potensial yang ada pada suatu daerah. Dengan adanya strategi pengembangan potensi ekonomi daerah, maka strategi harus dibuat berdasarkan adanya celah serta potensi yang terdapat pada suatu daerah dengan menunjukkan kelebihan yang terdapat pada daerah dan adanya kebijakan pemerintah daerah tersebut terhadap dunia usaha.

Metodelogi

Untuk mengidentifikasi sektor-sektor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif yang dikaji secara kuantitatif. Sugiyono (2016) menyatakan, bahwa metode kuantitatif merupakan metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang kongkrit, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Timur Atas

Dasar Harga Konstan tahun 2018 – 2022 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan tahun 2018 – 2022. Data yang diperoleh sebelumnya selanjutnya akan diproses menggunakan analisis *Location Quotient*. Selanjutnya, hasil analisis sektor unggulan akan dibandingkan dengan sektor prioritas yang sudah ada di Lombok Timur agar dapat memberikan saran penelitian yang lebih relevan.

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis ekonomi wilayah terutama dari kriteria kontribusi. *Location Quotient* adalah suatu teknik perhitungan yang mudah untuk menunjukkan spesialisasi relatif (kemampuan) wilayah dalam kegiatan atau karakteristik tertentu (Rondinelli, 1985). Berikut merupakan formula untuk menghitung LQ (Sihombing, 2018 dalam Asyafina, 2022).

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Keterangan:

- LQ = Koefisien *Location Quotient*
 vi = PDRB sektor i di Kabupaten Lombok Timur pada tahun tertentu
 vt = Total PDRB di Kabupaten Lombok Timur pada tahun tertentu
 Vi = PDRB sektor i di Provinsi NTB pada tahun tertentu
 Vt = Total PDRB di Provinsi NTB pada tahun tertentu

Berdasarkan persamaan di atas, maka nilai LQ dapat memberikan hasil pengertian sebagai berikut:

- Jika nilai LQ = 1, maka tingkat spesialisasi pada sektor i di Kabupaten Lombok Timur adalah sama dengan sektor yang sejenis dalam perekonomian Provinsi NTB.
- Jika nilai LQ > 1, maka tingkat spesialisasi sektor i di Kabupaten Lombok Timur lebih besar dibanding dengan sektor sejenis di Provinsi NTB. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Lombok timur.
- Jika nilai LQ < 1, maka tingkat spesialisasi sektor i di Kabupaten Lombok Timur lebih kecil dibanding dengan sektor sejenis di Provinsi NTB. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor tersebut termasuk sektor non basis dan kurang berpotensi untuk perekonomian di Kabupaten Lombok Timur.

Studi kasus

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan alat analisis yang berfungsi untuk membandingkan sektor perekonomian di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan sektor ekonomi yang sejenis. Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor ekonomi pada PDRB Kabupaten Lombok Timur yang termasuk kedalam kelompok sektor basis atau non basis. Berikut Hasil dari analisis LQ di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Perhitungan LQ

Lapangan Usaha	Rata-rata LQ	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,1983	Sektor Basis
Pertambangan dan Penggalian	0,4333	Sektor Non Basis
Industri Pengolahan	1,7146	Sektor Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	1,0003	Sektor Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,8681	Sektor Non Basis
Konstruksi	1,1444	Sektor Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motot	1,1832	Sektor Basis
Transportasi dan Pergudangan	0,6787	Sektor Non Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,6483	Sektor Non Basis

Informasi dan Komunikasi	0,8772	Sektor Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,7190	Sektor Non Basis
Real Estate	1,1120	Sektor Basis
Jasa Perusahaan	0,6278	Sektor Non Basis
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,1564	Sektor Basis
Jasa Pendidikan	1,0907	Sektor Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,0934	Sektor Basis
Jasa Lainnya	0,9423	Sektor Non Basis

Dalam proses perencanaan pembangunan, tentunya harus diperhatikan isu-isu utama yang terdapat di daerah Lombok Timur. Dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2018-2022 memuat arah kebijakan yang berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran selama lima tahun periode tersebut. Arah kebijakan ini akan menentukan pilihan strategi yang berfokus pada penanganan permasalahan setiap tahunnya, sehingga tercipta kesinambungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Melalui hal ini, maka akan diketahui sektor-sektor prioritas yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur. Berikut merupakan sektor prioritas yang didasarkan pada jumlah pendanaan terbesar dari proporsi total APBD Kabupaten Lombok Timur sepanjang tahun 2018-2022.

Tabel 1. Hasil Perhitungan LQ

Program	Rata-rata Kebutuhan Pendanaan	Proporsi dari Total Pendanaan
Urusan pemerintahan bidang pendidikan	232.903.157.765	27%
Urusan pemerintahan bidang kesehatan	381.140.308.473	28%
Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	287.174.676.655	21%
Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan	94.671.841.355	7%

Berdasarkan hasil analisis sektor prioritas dan sektor unggulan, dapat diketahui bahwa beberapa sektor prioritas di Kabupaten Lombok Timur sudah sejalan dengan sektor unggulan yang dimiliki pada saat ini. Berikut merupakan tabel perbandingan sektor prioritas dan sektor unggulan di Kabupaten Lombok Timur:

1. Sektor jasa pendidikan (sektor unggulan) dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan (sektor prioritas). Hal ini tidak lepas dari tujuan salah satu program pembangunan dalam RPJMD 2018-2023 yaitu fokus pada bidang pendidikan sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia yang disebut sebagai investasi menciptakan masyarakat sejahtera. Proporsi distribusi PDRB sektor jasa pendidikan adalah 5 persen dengan nilai LQ sebesar 1,0907. Hal inilah yang menyebabkan sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Lombok Timur. Adapun berdasarkan alokasi belanja pada APBD, urusan pemerintahan bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang memiliki proporsi belanja yang terbesar, yaitu 27 persen dengan rata-rata jumlah belanja Rp232.903.157.765.
2. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (sektor unggulan) dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan (sektor prioritas). Sektor kesehatan menjadi sektor prioritas sekaligus unggulan karena sektor kesehatan memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah. Sektor kesehatan dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai bidang, seperti tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung lainnya. Selain itu, sektor kesehatan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Proporsi distribusi PDRB sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial adalah 3 persen dengan nilai LQ sebesar 1,0934. Hal inilah yang menyebabkan sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Lombok Timur. Adapun berdasarkan alokasi belanja pada APBD, urusan pemerintahan bidang kesehatan merupakan salah satu sektor yang memiliki proporsi belanja yang terbesar, yaitu 28 persen dengan rata-rata jumlah belanja Rp381.140.308.473.

3. Sektor konstruksi dan sektor real estate (sektor unggulan) dengan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (sektor prioritas). Hal ini tidak lepas dari misi Kabupaten Lombok Timur dalam hal membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan. Selain itu, Sektor ini merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Proporsi distribusi PDRB sektor konstruksi dan sektor real estate berturut turut adalah 11 dan 4 persen dengan nilai LQ lebih dari satu. Hal inilah yang menyebabkan sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Lombok Timur. Adapun berdasarkan alokasi belanja pada APBD, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan salah satu sektor yang memiliki proporsi belanja yang terbesar, yaitu 21 persen dengan rata rata jumlah belanja Rp287.174.676.655.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) di Kabupaten Lombok Timur selama tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang basis pada masa sekarang adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor real estate; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dimana sektor tersebut merupakan sektor yang mampu memenuhi kebutuhan perekonomian Kabupaten Lombok Timur dan cenderung berpotensi untuk mengekspor ke daerah lain.
2. Berdasarkan analisis sektor prioritas di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur menitikberatkan pada urusan pemerintahan yang wajib, dengan alokasi dana sebesar Rp 2,079 triliun lebih. Sejumlah sektor yang mendapatkan perhatian khusus antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, serta sektor sosial. Sebagian besar dari sektor prioritas ini sudah sejalan dengan sektor unggulan yang ada di Lombok Timur.
3. Berdasarkan perbandingan sektor unggulan dan sektor prioritas, terdapat beberapa sektor unggulan yang termasuk ke dalam sektor prioritas di Kabupaten Lombok Timur antara lain: Sektor jasa pendidikan (sektor unggulan) dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan (sektor prioritas); Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (sektor unggulan) dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan (sektor prioritas); Sektor konstruksi dan sektor real estate (sektor unggulan) dengan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (sektor prioritas).
4. Ketidaksesuaian beberapa sektor unggulan yang tidak termasuk dalam sektor prioritas ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, penetapan sektor prioritas Kabupaten Lombok Timur berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah; pemerintah daerah dapat menetapkan sektor prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat; pemerintah daerah dapat menetapkan sektor prioritas berdasarkan ketersediaan sumber daya.

Referensi

- Arsyad, Lincoln., 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE UGM.Yogyakarta.
- Asyafina, D. R., & Muljaningsih, S. (2022). Analisis Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Madiun. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(1), 11-27.
- Atama, S. J. (2016). Analisis Potensi Ekonomi Lokal untuk pengembangan dan Penguatan Daya Saing Daerah di Kabupaten Alor Tahun 2009-2013.
- _____, (2018-2022). Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. *Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha*, 2018-2022. Lombok Timur
- _____, (2023). Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. *Lombok Timur dalam Angka*. Lombok Timur
- Hudiyanto, 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Cetakan Ketiga, September 2015. Lingkar Media, Kasihan Bantul Yogyakarta.
- Isard, W. (1956). Location and space-economy.
- Kurniawan, Bambang., 2016. "Analisis sektor ekonomi unggulan kabupaten kerinci provinsi Jambi". *Islamic Economics Journal*, Volume 01, nomor 01, Januari-Juni 2016, ISSN 2354-905X.

- Lantemona, A., Kalangi, J., & Naukoko, A. (2014). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3).
- Lely Indah, Anggraeny Puspaningtyas, and Siti Rochmah. 2013. Analysis Of Local Economic Potential And Competitiveness Economic Sector In Improving Local Economic Development (Study In Batu City). *Journal Administration Publik (JAP)*, Vol 3, No.1, h. 151-156.
- Mardiasmo & Kirana, W. J. (1999). Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik,'(Managing public-oriented regional finance). Yogyakarta: Kompak STIE YO Indonesia.
- Permendagri No.13 Tahun 2006
- Putra, K. E. B. (2019). Analisis Sektor Basis Ekonomi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surabaya Tahun 2013-2016.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115-122.
- Rompas, Jui., Deisy Engka, dan Krest Tolosang, 2015. "Potensi Sektor Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 15 No. 04
- RPJMD Kabupaten Lombok Timur 2018-2023
- Satrianto, A., & Sasongko, B. (2019). Determination Of The Same Leading Sectors In Blitar City. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 12(2), 382-402.
- Siswidiyanto, Budhi Setianingsih dan Endah Setyowati, 2012. "Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA)". *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 03, Nomor 11, Hal. 1930-1936.
- Soekartawi, 1990. *Teori Ekonomi Produksi dengan pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Douglas*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, D. 2016. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Supriadi, A., Nurvianto, M., & Prasaja, A. S. 2022. Analisis Potensi Sektor Basis dan Non Basis Kabupaten Payakumbuh Tahun 2018-2021. *Al-Ijtima'i: Jurnal Internasional Ilmu Pemerintahan dan Sosial*, 8(1), 1-10.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005
- Wahyuningtyas, R., Rusgiyono, A., & Wilandari, Y. (2013). Analisis sektor unggulan menggunakan data PDRB (Studi kasus BPS Kabupaten Kendal tahun 2006-2010). *Jurnal Gaussian*, 2(3), 219-228.
- Yuliastati, Y. (2017). Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *Katalogis*, 4(12).